

Politik dan *Shalom*: Partisipasi Politik Umat Kristiani dalam Mengimplementasikan *Shalom* di Indonesia

Eddy Simanjuntak¹, Martina Novalina²

^{1,2}Sekolah Tinggi Teologi Ekumene, Jakarta

Correspondence: eddy.simanjuntak@sttekumene.ac.id

Abstract

The political constellation of Indonesia during the 2014 and 2019 general elections revealed a complex dynamic, marked by sharp polarization and the dominance of sectarian interests that often neglected the common welfare. In this context, a portion of Christians demonstrated an apathetic attitude toward politics, perceiving it as a corrupt realm irrelevant to their faith. This phenomenon is reflected in recent statistical data, which shows that the percentage of Christians relative to the total population declined from 7.60% in 2019 to 7.41% in 2023. A survey by Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) in December 2022 indicated that 43% of non-Muslim voters supported Ganjar Pranowo, while Anies Baswedan and Prabowo Subianto received 17% and 16%, respectively; 24% of non-Muslim voters remained undecided, reflecting doubt or distrust toward the available candidates. This study aims to examine the role of the Church and Christian communities in actively participating in politics as part of God's calling to achieve *shalom*—a holistic peace and well-being. Employing a descriptive qualitative approach through a literature review, the investigation emphasizes the value of the Church in shaping political awareness among believers and encouraging responsible and active engagement in democratic processes. In Indonesia's pluralistic society, politics should not be shunned but understood as a mission field to express God's love and justice.

Keywords: Christianity participation; church participation; politics; *shalom*

Abstrak

Konstelasi politik Indonesia pada pemilu 2014 dan 2019 menunjukkan dinamika yang kompleks, ditandai dengan polarisasi tajam dan dominasi kepentingan golongan yang kerap mengabaikan kesejahteraan bersama. Dalam konteks ini, sebagian umat Kristen menunjukkan sikap apatis terhadap politik, memandangnya sebagai dunia yang kotor dan tidak relevan dengan iman. Fenomena ini tercermin dalam data statistik terbaru, di mana persentase umat Kristen terhadap total penduduk menurun dari 7,60% pada 2019 menjadi 7,41% pada 2023. Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Desember 2022 menunjukkan bahwa 43% pemilih non-Muslim memilih Ganjar Pranowo, sementara Anies Baswedan dan Prabowo Subianto masing-masing memperoleh 17% dan 16%; namun, 24% pemilih non-Muslim belum menentukan pilihan, mencerminkan adanya keraguan atau ketidakpercayaan terhadap para kandidat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran gereja dan umat Kristen dalam berpartisipasi aktif dalam politik sebagai bagian dari panggilan Allah untuk mewujudkan *shalom*—damai sejahtera yang menyeluruh. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur, penelitian ini menyoroti pentingnya gereja dalam membentuk kesadaran politik umat serta mendorong keterlibatan aktif dan bertanggung jawab dalam proses demokrasi. Dengan demikian, politik tidak semestinya dihindari, melainkan dipahami sebagai ladang misi untuk menyatakan kasih dan keadilan Allah di tengah masyarakat majemuk Indonesia.

Kata Kunci: politik; partisipasi gereja; partisipasi Kristen; *shalom*

PENDAHULUAN

Konstelasi politik di Indonesia pada pemilu tahun 2014 dan 2019 memperlihatkan dinamika perpolitikan yang sangat kompleks. Terutama dalam masa kampanye dan paska pemilihan presiden, berbagai gerakan dari politisi serta pendukung fanatik masing-masing kelompok menggambarkan betapa kuatnya kepentingan golongan dalam perebutan kekuasaan. Hal ini sering kali mengabaikan tujuan sesungguhnya dari politik itu sendiri. Ketidakpuasan dan kecurigaan antar kubu memperburuk polarisasi yang ada, menciptakan pertikaian, dan bahkan mencemarkan moralitas dalam politik, yang seharusnya berfokus pada kesejahteraan rakyat. Sebagai akibatnya, banyak masyarakat, terutama umat Kristen, merasa enggan untuk terlibat dalam politik, bahkan menganggapnya sebagai dunia yang kotor dan hanya menguntungkan golongan tertentu.

Fenomena ini diperburuk dengan pandangan apatis sebagian besar umat Kristen yang semakin menutup diri dari dunia politik. Banyak di antara mereka yang meragukan apakah politik masih memiliki potensi untuk memberikan perubahan positif atau apakah masih ada harapan untuk terlibat dalam sistem yang dianggap penuh dengan tipu daya dan ambisi pribadi. Dalam konteks ini, gereja seharusnya tidak hanya diam menyaksikan, melainkan juga harus mengambil bagian untuk merespon panggilan Allah dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa melalui politik yang berlandaskan nilai-nilai Kristen.

Fenomena apatisisme umat Kristen terhadap politik di Indonesia, yang diperparah oleh polarisasi tajam dalam Pemilu 2014 dan 2019, tercermin dalam data statistik terbaru. Meskipun jumlah umat Kristen meningkat secara absolut, persentasenya terhadap total penduduk menurun dari 7,60% pada 2019 menjadi 7,41% pada 2023.¹ Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Desember 2022 menunjukkan bahwa 43% pemilih non-Muslim memilih Ganjar Pranowo, sementara Anies Baswedan dan Prabowo Subianto masing-masing memperoleh 17% dan 16%.² Namun, 24% pemilih non-Muslim belum menentukan pilihan, menunjukkan adanya keraguan atau ketidakpercayaan terhadap kandidat yang ada.³ Data ini mengindikasikan bahwa meskipun ada keterlibatan umat Kristen dalam politik, masih terdapat keengganan yang signifikan. Gereja memiliki peran penting dalam mengedukasi dan mendorong umat untuk berpartisipasi aktif dalam politik, guna mewujudkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Beberapa penelitian yang relevan menunjukkan pentingnya keterlibatan politik umat Kristen dalam pembangunan negara. Penelitian yang dilakukan Zai dan Gulo menyoroti pentingnya partisipasi politik umat Kristen sebagai bagian dari pelayanan

¹ Handi Irawan Djuwadi, "Handi Irawan Djuwadi Ketua Umum Bilangan Research Center, Mengulas Tren Jumlah Umat Kristen di Indonesia : Meningkat atau Menurun?," *Media Transformasi | Memang Diperlukan*, February 5, 2025, accessed May 5, 2025, <https://mediatransformasi.com/2025/02/05/handi-irawan-djuwadi-ketua-umum-bilangan-research-center-mengulas-tren-jumlah-umat-kristen-di-indonesia-meningkat-atau-menurun/>.

² Muhammad Nursam, "Survei SMRC: 24 Persen Pemilih Non-Muslim Belum Tentukan Pilihan," *FAJAR*, last modified March 9, 2023, accessed May 5, 2025, <https://fajar.co.id/2023/03/09/survei-smrc-24-persen-pemilih-non-muslim-belum-tentukan-pilihan/>.

³ Surya Dua Artha Simanjuntak, "SMRC Ungkap Distribusi Pemilih Muslim untuk Ganjar, Anies, dan Prabowo," *Bisnis.com*, last modified 2023, accessed May 5, 2025, <https://kabar24.bisnis.com/read/20230309/15/1635812/smr-ungkap-distribusi-pemilih-muslim-untuk-ganjar-anies-dan-prabowo>.

sosial yang sesuai dengan ajaran Alkitab.⁴ Mereka menyimpulkan bahwa keterlibatan aktif dalam politik bukan hanya sebagai bentuk tanggung jawab sosial, tetapi juga sebagai cara untuk mewujudkan nilai-nilai Kristiani dalam pemerintahan yang adil dan sejahtera. Penelitian lain oleh Lontoh dan Tangel⁵ mengungkapkan bahwa banyak umat Kristen yang masih menganggap politik sebagai dunia yang terpisah dari nilai-nilai agama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gereja perlu memainkan peran lebih aktif dalam mendidik jemaat untuk memahami politik sebagai bagian dari panggilan hidup mereka, serta menyadarkan umat Kristen akan pentingnya partisipasi mereka dalam menentukan kebijakan publik yang dapat menciptakan kedamaian dan keadilan sosial.

Selain itu, penelitian oleh Petonengan dkk., juga memperkuat pandangan bahwa gereja harus berperan dalam membentuk politik yang tidak hanya berorientasi pada kekuasaan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Alkitab.⁶ Hal ini sesuai dengan pemikiran John Calvin dalam Elungan dan Tamaweol, yang menyebutkan bahwa politik adalah profesi yang sakral, dan gereja memiliki tanggung jawab moral untuk terlibat dalam politik sebagai bentuk pelayanan kepada bangsa.⁷

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai peran gereja dan umat Kristen dalam berpartisipasi dalam politik sebagai upaya untuk mewujudkan *shalom* Allah di Indonesia. Dengan merujuk pada riset pendahuluan dan penelitian sebelumnya, penelitian ini berusaha menjawab beberapa pertanyaan utama, seperti: apa pengertian politik dan bagaimana sejarah perkembangannya di Indonesia; apa dasar teologis yang mendasari partisipasi politik umat Kristen; bagaimana implementasi *shalom* Allah dapat terwujud melalui partisipasi politik umat Allah di Indonesia; serta apa implikasi praktis dari partisipasi politik umat Kristen dalam mengimplementasikan *shalom* Allah di Indonesia. Melalui penelitian ini, kami berusaha mengisi kesenjangan yang ada dalam pemahaman umat Kristen mengenai politik sebagai sarana untuk melaksanakan panggilan Allah dalam konteks bernegara. Sebagai penutup, pernyataan masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: bagaimana gereja dan umat Kristen dapat mewujudkan peran serta mereka dalam politik demi tercapainya kesejahteraan bangsa Indonesia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Kristiani dalam setiap kebijakan publik yang diambil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena secara mendalam berdasarkan data non-numerik, dengan menggali informasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan. Menurut Mulyana,⁸ metode kualitatif deskriptif adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan dan

⁴ Nikarni Zai and Junidar Gulo, "Panggilan Kristen Dalam Politik: Melayani Dengan Integritas Dan Kasih," *Imitatio Christo: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 1, no. 1 (2025): 30–45.

⁵ Andheralvi Isaiiah Lontoh and Kristi Esandra Tangel, "Gerakan Pembebasan Allah Melalui Kristus dalam Roma 8 : 31-39 Sebagai Dasar Berpolitik Orang Kristen," *Jurnal Teologi Cultivation* 7, no. 2 (December 31, 2023): 96–111.

⁶ Gerli Safira Petonengan et al., "KAJIAN TEOLOGIS GEREJA DAN POLITIK: Analisis Transformasi Hubungan Dan Keterlibatan Kontemporer," *THEOSEBIA: Journal of Theology, Christian Religious Education and Psychospiritual* 1, no. 1 (August 30, 2024): 43–57.

⁷ Novallick Elungan and Roy Dekky Tamaweol, "Pandangan Yohanes Calvin Tentang Hubungan Gereja dan Politik serta Relevansinya Bagi Jemaat," *Educatio Christi* 5, no. 1 (2024).

⁸ Asep Mulyana et al., *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Penerbit Widina, 2024).

menggambarkannya secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat hubungan antar fenomena yang diteliti. Studi literatur sendiri merupakan teknik pengumpulan data dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik.

Tahapan dalam penelitian ini meliputi: (1) identifikasi dan pengumpulan referensi ilmiah seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen gerejawi yang relevan dengan tema partisipasi politik dan teologi *shalom*; (2) analisis isi dari referensi tersebut untuk menemukan benang merah antara politik dan iman Kristen; (3) interpretasi data secara teologis dan kontekstual untuk menjawab rumusan masalah; serta (4) penyusunan kesimpulan dan implikasi praktis dari hasil analisis tersebut dalam konteks masyarakat Indonesia. Metode ini dipilih untuk memberikan pemahaman yang utuh dan reflektif terhadap peran gereja dan umat Kristen dalam mewujudkan *shalom* Allah melalui partisipasi politik yang aktif dan bertanggung jawab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik sebagai Diskursus Teologi

Politik merupakan ilmu yang sangat tua dan terus mengalami perkembangan sepanjang sejarah peradaban manusia. Secara etimologis, kata *politik* berasal dari bahasa Yunani *politheia*, yang merupakan gabungan dari *polis* (kota/negara/kesatuan masyarakat) dan *theia* (urusan). Dalam perkembangan bahasa Inggris, istilah ini melahirkan dua bentuk utama, yakni *politics* yang merujuk pada prinsip atau alat untuk mencapai tujuan tertentu, dan *policy* yang merujuk pada kebijakan untuk menjamin tercapainya tujuan tersebut.⁹ Secara esensial, politik berkaitan erat dengan pengelolaan urusan negara, hak-hak warga negara, sistem pemerintahan, dan bentuk-bentuk kekuasaan. Para filsuf Yunani seperti Plato dan Aristoteles memandang politik sebagai sarana untuk mencapai *the good life* yaitu kehidupan yang baik dalam kerangka masyarakat yang adil dan tertib. Negara bagi mereka merupakan entitas organik tempat manusia hidup bersama secara saling terhubung demi kesejahteraan bersama.¹⁰ Oleh karena itu, politik tidak hanya bersifat teknis atau administratif, tetapi juga merupakan seni dalam memimpin, memengaruhi, dan membuat keputusan kolektif.

Sepanjang sejarah, bentuk pemerintahan sebagai bagian dari praktik politik mengalami evolusi. Aristoteles mengklasifikasikan tiga bentuk utama: monarki (kekuasaan tunggal), aristokrasi (kekuasaan oleh segelintir orang bijak), dan timokrasi atau demokrasi (kekuasaan oleh rakyat). Ketiga bentuk ini memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing, termasuk potensi penyimpangan seperti monarki menjadi tirani atau demokrasi menjadi kekuasaan massa yang tidak terkendali. Sistem aristokrasi, meskipun awalnya berbasis pada kualitas kepemimpinan, dalam praktiknya sering menyatu dengan struktur sosial turun-temurun yang menimbulkan ketimpangan.¹¹ Gerakan Renaisans dan Reformasi menantang sistem tersebut dan membuka jalan bagi kebebasan individu yang menjadi fondasi demokrasi modern.

Monarki adalah bentuk pemerintahan tertua, di mana raja sebagai penguasa tunggal memegang kekuasaan absolut. Namun bentuk ini sangat bergantung pada kepribadian dan kebijaksanaan raja. Sebaliknya, demokrasi yang berasal dari kata *demos* (rak-

⁹ Hasahatan Hutahaeen, "Teologi Politik Gereja; Menemukan dan Memancarkan Tritugas Gereja dalam Pilkada dan Pilpres: Indonesia," *Melo: Jurnal Studi Agama-agama* 1, no. 1 (June 23, 2021): 1–17.

¹⁰ Abraham Edel, *Aristotle and His Philosophy*, 2nd ed. (New York: Routledge, 2017).

¹¹ Muhtar Haboddin, *Pengantar Ilmu Pemerintahan* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2015).

yat) dan *kratos* (kekuasaan) menawarkan sistem pemerintahan di mana rakyat menjadi pemilik kekuasaan tertinggi.¹² Dalam demokrasi, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan menjadi prinsip utama, sebagaimana diungkapkan Abraham Lincoln: “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.”¹³

Perkembangan demokrasi tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang pemikiran politik, mulai dari demokrasi langsung di Athena, dokumen *Magna Charta*, hingga teori pembagian kekuasaan oleh Montesquieu. Gerakan Pencerahan juga turut memperkuat posisi individu dan menentang kekuasaan absolut.¹⁴ Di era modern, demokrasi mengalami gelombang globalisasi melalui proses demokratisasi yang luas, meskipun dalam praktiknya muncul tantangan seperti konflik sosial, korupsi, atau ketimpangan representasi. Robert A. Dahl dalam Semetko dan Scammell¹⁵ bahkan mengusulkan istilah *poliarki* untuk menggambarkan sistem demokrasi modern yang lebih pluralistik dan realistis. Menurut Dahl, dalam praktiknya, demokrasi tidak sepenuhnya dijalankan oleh rakyat secara langsung, melainkan melalui institusi-institusi perwakilan dan berbagai mekanisme partisipasi yang memungkinkan adanya persaingan yang adil, kebebasan berpendapat, dan akses yang setara terhadap informasi. Poliarki menekankan pentingnya keterlibatan banyak kelompok dalam proses pengambilan keputusan politik, sehingga kekuasaan tidak terpusat pada satu elite atau kelompok tertentu. Dalam sistem poliarki, kebebasan sipil, hak untuk memilih dan dipilih, serta keberadaan oposisi yang sah menjadi indikator penting dari kualitas demokrasi. Konsep ini membantu menjelaskan bagaimana demokrasi dapat berfungsi dalam masyarakat modern yang kompleks, dengan struktur sosial yang beragam dan kebutuhan untuk menjaga stabilitas serta keterwakilan secara seimbang.

Dalam konteks Indonesia, politik demokrasi mengalami perkembangan signifikan terutama pasca-reformasi 1998. Sistem pemilu langsung dan desentralisasi kekuasaan mencerminkan semangat partisipasi rakyat dalam pemerintahan.¹⁶ Meskipun implementasinya menghadapi berbagai tantangan, demokrasi tetap menjadi sistem politik yang paling relevan dan dapat diterima oleh masyarakat luas, karena menjamin partisipasi, keadilan, dan pemerintahan yang lebih transparan. Dengan demikian, sejarah perkembangan politik menunjukkan bahwa politik adalah proses dinamis yang selalu berkembang menyesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat, tantangan zaman, dan kebutuhan akan pemerintahan yang adil dan partisipatif. Dari monarki hingga demokrasi, dari aristokrasi hingga poliarki, politik terus menjadi alat penting dalam mewujudkan tatanan sosial yang lebih baik.

Partisipasi Politik: Sebuah Eksplorasi Teologis

Partisipasi politik merupakan bentuk keterlibatan aktif warga negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara. Bentuk partisipasi ini dapat berupa aktivitas seperti memberikan suara dalam pemilu, menyampaikan aspirasi melalui lembaga perwakilan, maupun terlibat dalam advokasi kebijakan publik. Dalam konteks demokrasi,

¹² Yoshua Budiman Harahap, “Demo(n)s Dan Kratos: Kritik Terhadap Praktik Demokrasi Dari Kacamata Kekristenan,” *Jurnal Kenosis* 6, no. 2 (2020), accessed May 5, 2025.

¹³ A. Faidi, *Abraham Lincoln: Bapak Demokrasi Sepanjang Masa* (Yogyakarta: IRCISOD, 2015).

¹⁴ Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu Politik* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers, 2023).

¹⁵ Holli A. Semetko and Margaret Scammell, *Baik dan Buruk dalam Penelitian Komunikasi Politik: Handbook Komunikasi Politik* (Yogyakarta: Nusamedia, 2021).

¹⁶ Kasman Bakry et al., *Sistem Politik Indonesia* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

partisipasi politik menjadi cerminan dari kualitas pemerintahan serta tingkat kepedulian masyarakat terhadap nasib bangsa. Rendahnya partisipasi sering kali menandakan apatisme dan ketidakpercayaan terhadap sistem politik, yang dalam jangka panjang dapat melemahkan legitimasi pemerintahan.¹⁷

Dari sudut pandang teologis, partisipasi politik umat Kristen bukan sekadar hak sebagai warga negara, melainkan bagian dari tanggung jawab iman yang bersumber dari ajaran Alkitab. Kitab Suci memuat prinsip-prinsip moral dan etika yang mendasari kehidupan sosial dan pemerintahan. Dalam Perjanjian Lama, seperti terlihat dalam Dasa Titah (Kel. 20; Ul. 5), umat diajarkan untuk menjunjung tinggi keadilan, menghormati sesama, dan menjaga integritas moral dalam kehidupan bermasyarakat dan nilai-nilai yang juga relevan dalam sistem politik yang adil. Sementara itu, Perjanjian Baru memperluas makna kasih kepada sesama, seperti tergambar dalam perumpamaan orang Samaria yang baik hati (Luk. 10:25–37), yang mendorong umat untuk peduli pada kesejahteraan semua orang tanpa memandang latar belakang sosial atau agama.

Dalam sejarah gereja, pemikiran para Bapa Gereja dan reformator memberikan landasan teologis yang beragam mengenai relasi antara gereja dan negara. Agustinus membedakan antara *civitas Dei* (kota Allah) dan *civitas terrena* (kota dunia), namun tetap mengakui fungsi negara dalam menegakkan ketertiban. Sebaliknya, Martin Luther memisahkan ranah gereja dan negara namun menegaskan bahwa keduanya merupakan bagian dari kehendak Allah, dan umat Kristen tetap wajib menghormati pemerintah. John Calvin, meski melihat penguasa sebagai wakil Allah, menegaskan pentingnya kritik terhadap pemerintah yang bertentangan dengan nilai Injil.¹⁸

Partisipasi politik umat Kristen tidak selalu berarti keterlibatan dalam politik praktis, melainkan lebih pada peran kenabian gereja yang menyuarakan nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kasih di tengah masyarakat. Dalam konteks Indonesia, hal ini tercermin dalam ajakan bagi gereja untuk berkontribusi secara nyata dalam membangun bangsa melalui sikap kritis, etis, dan konstruktif terhadap kebijakan negara, sesuai dengan panggilan profetis seperti tertuang dalam Yeremia 29:7, yaitu untuk “Usahakanlah kesejahteraan kota ke mana kamu Aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada TUHAN, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu.”

Dengan demikian, partisipasi politik bagi umat Kristen tidak bisa dilepaskan dari dasar iman yang mendorong keterlibatan aktif dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Tugas gereja bukan hanya membina kehidupan rohani, tetapi juga membentuk umat yang sadar akan tanggung jawab sosial dan politiknya sebagai bagian dari panggilan ilahi untuk menghadirkan damai sejahtera Allah di tengah dunia.

Implementasi Shalom Allah Melalui Partisipasi Politik Umat Allah bagi Indonesia

Shalom (Ibrani: שָׁלוֹם) berarti "damai", "perdamaian," atau "ketenangan," dan digunakan sebanyak 237 kali dalam Perjanjian Lama. Dalam konteks Alkitab, *shalom* memiliki arti yang dalam dan luas, meliputi pembebasan dari penindasan, dosa, kematian, peperangan, perbudakan, pemenjaraan, dan pembuangan. *Shalom* tidak hanya berarti keadaan tanpa konflik, melainkan juga keadaan utuh (*completeness*), harmonis (*harmony*), pemu-

¹⁷ Muhamad Ruslan, “Kajian Hukum Tentang Politik Uang Dalam Kampanye Menjelang Pemilihan Umum: Legal Study on Money Politics in Campaigns Ahead of General Elections,” *PESOLAH: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 1, no. 1 (March 30, 2025): 1–11.

¹⁸ Juniarso Ridwan and Achmad Sodik, *Tokoh-Tokoh Ahli Pikir tentang Negara dan Hukum: Dari Zaman Yunani Kuno sampai Abad 20* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2023).

lian hubungan (*unimpaired relationship*), dan keutuhan (*wholeness*). Dalam Perjanjian Lama, shalom adalah karya Allah yang membebaskan umat-Nya dan memberi mereka hidup yang damai dan berkeadilan.

Shalom juga dikaitkan dengan kehadiran Allah dan hubungan yang erat dengan-Nya. Dalam Hakim-hakim 6:12 dikatakan “Tuhan menyertai engkau”, yang menjadi dasar bagi damai sejahtera. Mazmur 37:11-37 menyebut bahwa orang benar akan memiliki damai yang melimpah. Makna shalom mencakup kesehatan, kekayaan, keamanan, dan keadilan sosial¹⁹. Dalam konteks sosial-politik, shalom tidak terlepas dari kehadiran Allah melalui pemulihan dan pembebasan dari penindasan. Sipahutar menyebut bahwa perjanjian Sinai adalah perjanjian shalom, yang tidak hanya berarti damai, tetapi juga kemakmuran, hidup, berkat, keselamatan, dan kepercayaan kepada Allah.²⁰

Shalom juga berkaitan dengan kepemimpinan raja yang adil. Dalam konteks Israel, pemulihan melalui pembebasan dari Mesir membawa mereka pada pemulihan hubungan dengan Allah dan bangsa-bangsa lain. Dami menekankan bahwa shalom berasal dari Allah, namun selalu dikaitkan dengan kehidupan dunia dan masyarakat.²¹ Dalam konteks ini, partisipasi politik umat Allah di Indonesia dapat menjadi wujud nyata dari implementasi shalom Allah melalui keterlibatan dalam membangun keadilan, menghapus penindasan, serta memperjuangkan kesejahteraan dan kehidupan yang utuh bagi semua.

Dalam Perjanjian Baru, shalom diterjemahkan dari kata Yunani *eirēnē*, yang muncul sebanyak 91 kali dan 24 kali dalam Injil Lukas. *Shalom* adalah karya Allah atas umat-Nya, keselamatan dan pemulihan, serta panggilan bagi orang percaya dalam mengikut Yesus dan menjalankan misi-Nya. Yesus adalah pembawa damai sejahtera (Luk. 2:24, Ef 2:17), dan damai ini mempersatukan Yahudi dan non-Yahudi dalam gereja. Damai sejahtera dalam Perjanjian Baru adalah hasil dari iman orang percaya (Rm 15:13). Yohanes 14:27 mencatat bahwa damai yang diberikan Yesus berbeda dari damai yang diharapkan dunia atau secara politis. Damai dari Yesus adalah pemulihan relasi dengan Allah, sesama, dan alam semesta. Maka, *shalom* adalah pedoman dan karunia Allah dalam mengelola konflik dan membangun relasi yang harmonis.

Dengan demikian, implementasi *shalom* Allah melalui partisipasi politik umat Allah bagi Indonesia berarti keterlibatan aktif umat dalam ranah publik dan pemerintahan demi menghadirkan keadilan, pemulihan, dan damai yang berasal dari Allah. Ini bukan sekadar hasil kemampuan manusia, tetapi wujud dari karya penyelamatan Allah yang menghadirkan kebaikan dan kesejahteraan bagi seluruh ciptaan. Melalui partisipasi yang didasarkan pada nilai-nilai shalom, umat Allah terpenggil untuk menjadi agen transformasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

KESIMPULAN

Partisipasi politik umat Kristen merujuk pada keterlibatan umat Kristen dalam menggunakan hak politik mereka untuk mengimplementasikan shalom Allah, demi kemajuan

¹⁹ Agus Supratikno, “Merajut Kembali Komunitas Damai: Studi Landasan Biblis Dan Teologis Resolusi Konflik,” *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat* 3, no. 2 (2019).

²⁰ Roy Charly Sipahutar, “Kajian Ekoteologis tentang Konsep tanah dalam Perjanjian Lama dan Implikasinya bagi Pemeliharaan Tanah,” *BIA’: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual* 2, no. 2 (December 30, 2019): 166–178.

²¹ Zummy Anselmus Dami, “Pedagogi Shalom: Analisis Kristis Terhadap Pedagogi Kritis Henry A. Giroux Dan Relevansinya Bagi Pendidikan Kristen Di Indonesia,” *Jurnal Filsafat* 29, no. 1 (2019): 134–165.

bangsa Indonesia yang sejahtera, damai, dan adil tanpa memandang suku atau agama. Partisipasi ini melibatkan umat Kristen dalam memilih pemimpin dan menentukan kebijakan yang akan dijalankan, dengan tujuan untuk membawa perubahan positif bagi bangsa. Umat Kristen memiliki peranan penting dalam menentukan arah negara, sehingga dengan terpilihnya pemimpin yang berkualitas, shalom Allah dapat diimplementasikan di Indonesia. Partisipasi politik umat Kristen tidak hanya berfokus pada kepentingan golongan Kristen, tetapi juga untuk kepentingan bangsa Indonesia yang majemuk dan berlandaskan pada demokrasi Pancasila. Dengan kesatuan yang terjalin erat, perpecahan yang merugikan bangsa dapat dihindari. Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi politik umat Kristen semakin meningkat, dengan berkurangnya pandangan apatis terhadap politik dan anggapan bahwa politik adalah hal yang tabu atau kotor. Hal ini disebabkan oleh sosialisasi yang dilakukan oleh gereja-gereja dalam mempersiapkan umat Kristen untuk memilih pemimpin yang bermoral dan berintegritas, memberikan harapan dan ketenangan bagi bangsa. Partisipasi politik umat Kristen kini tidak lagi dilihat secara sempit, melainkan dilihat sebagai bagian dari upaya mewujudkan kebersamaan dalam berbangsa. Gereja sebagai lembaga institusi memiliki peran penting dalam mendorong umat Kristen untuk berpartisipasi dalam politik dan bertanggung jawab dalam menggunakan hak politik mereka demi kemajuan bangsa.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa saran kepada gereja untuk terus membimbing umat Kristen dalam kehendak Allah sehingga shalom Allah dapat diimplementasikan di Indonesia. Gereja sebaiknya memfasilitasi umat Kristen dengan memberikan pemahaman mengenai politik dan partisipasi kebangsaan, serta membantu umat memahami bagaimana shalom Allah diterapkan dalam konteks kebangsaan Indonesia yang majemuk. Selain itu, gereja perlu melakukan pendampingan pastoral terhadap umat Kristen, baik sebagai pemilih atau yang terpilih, untuk memastikan bahwa partisipasi politik mereka sesuai dengan panggilan umat Kristen dalam membumikan *shalom* Allah. Mengenai keterbatasan penelitian, umat Kristen yang terdiri dari berbagai denominasi dan pemahaman yang berbeda-beda menyebabkan kami tidak dapat menjangkau seluruh umat Kristen di Indonesia. Kami juga membatasi fokus pada partisipasi politik umat Kristen, namun berencana untuk melanjutkan penelitian terhadap kategori-kategori lainnya untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap dan tepat tentang partisipasi politik umat Kristen di Indonesia.

REFERENSI

- Bakry, Kasman, Jana Milia, Rengga Yudha Santoso, Saiful Asra, Muhammad Akbar Hajuan, Mohammad Maiwan, Sumardi Sumardi, et al. *Sistem Politik Indonesia*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Dami, Zummy Anselmus. "Pedagogi Shalom: Analisis Kristis Terhadap Pedagogi Kritis Henry A. Giroux Dan Relevansinya Bagi Pendidikan Kristen Di Indonesia." *Jurnal Filsafat* 29, no. 1 (2019): 134–165.
- Djuwadi, Handi Irawan. "Handi Irawan Djuwadi Ketua Umum Bilangan Research Center, Mengulas Tren Jumlah Umat Kristen di Indonesia : Meningkat atau Menurun?" *Media Transformasi | Memang Diperlukan*, February 5, 2025. Accessed May 5, 2025. <https://mediatransformasi.com/2025/02/05/handi-irawan-djuwadi-ketua-umum-bilangan-research-center-mengulas-tren-jumlah-umat-kristen-di-indonesia-meningkat-atau-menurun/>.
- Djuyandi, Yusa. *Pengantar Ilmu Politik*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers, 2023.

- Edel, Abraham. *Aristotle and His Philosophy*. 2nd ed. New York: Routledge, 2017.
- Elungan, Novallick, and Roy Dekky Tamaweol. "Pandangan Yohanes Calvin Tentang Hubungan Gereja dan Politik serta Relevansinya Bagi Jemaat." *Educatio Christi* 5, no. 1 (2024).
- Faidi, A. *Abraham Lincoln: Bapak Demokrasi Sepanjang Masa*. Yogyakarta: IRCISOD, 2015.
- Haboddin, Muhtar. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2015.
- Harahap, Yoshua Budiman. "Demo(n)s Dan Kratos: Kritik Terhadap Praktik Demokrasi Dari Kacamata Kekristenan." *Jurnal Kenosis* 6, no. 2 (2020). Accessed May 5, 2025. <https://core.ac.uk/reader/389008910>.
- Hutahaeen, Hasahatan. "Teologi Politik Gereja; Menemukan dan Memancarkan Tritugas Gereja dalam Pilkada dan Pilpres: Indonesia." *Melo: Jurnal Studi Agama-agama* 1, no. 1 (June 23, 2021): 1–17.
- Lontoh, Andheralvi Isaiah, and Kristi Esandra Tangel. "Gerakan Pembebasan Allah Melalui Kristus dalam Roma 8 : 31-39 Sebagai Dasar Berpolitik Orang Kristen." *Jurnal Teologi Cultivation* 7, no. 2 (December 31, 2023): 96–111.
- Mulyana, Asep, Cory Vidiati, Pri Agung Danarahmanto, Alfiyah Agussalim, Wiwin Apriani, Fiansi Fiansi, Fitra Fitra, et al. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Widina, 2024.
- Nursam, Muhammad. "Survei SMRC: 24 Persen Pemilih Non-Muslim Belum Tentukan Pilihan." *FAJAR*. Last modified March 9, 2023. Accessed May 5, 2025. <https://fajar.co.id/2023/03/09/survei-smrc-24-persen-pemilih-non-muslim-belum-tentukan-pilihan/>.
- Petonengan, Gerli Safira, Alvionita Indasari Taidi, Laura Indah Takalamingan, and Yuningsi Metusala. "KAJIAN TEOLOGIS GEREJA DAN POLITIK: Analisis Transformasi Hubungan Dan Keterlibatan Kontemporer." *THEOSEBIA: Journal of Theology, Christian Religious Education and Psychospiritual* 1, no. 1 (August 30, 2024): 43–57.
- Ridwan, Juniarto, and Achmad Sodik. *Tokoh-Tokoh Ahli Pikir tentang Negara dan Hukum: Dari Zaman Yunani Kuno sampai Abad 20*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2023.
- Ruslan, Muhamad. "Kajian Hukum Tentang Politik Uang Dalam Kampanye Menjelang Pemilihan Umum: Legal Study on Money Politics in Campaigns Ahead of General Elections." *PESOLAH: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 1, no. 1 (March 30, 2025): 1–11.
- Semetko, Holli A., and Margaret Scammell. *Baik dan Buruk dalam Penelitian Komunikasi Politik: Handbook Komunikasi Politik*. Yogyakarta: Nusamedia, 2021.
- Simanjuntak, Surya Dua Artha. "SMRC Ungkap Distribusi Pemilih Muslim untuk Ganjar, Anies, dan Prabowo." *Bisnis.com*. Last modified 2023. Accessed May 5, 2025. <https://kabar24.bisnis.com/read/20230309/15/1635812/smrc-ungkap-distribusi-pemilih-muslim-untuk-ganjar-anies-dan-prabowo>.
- Sipahutar, Roy Charly. "Kajian Ekoteologis tentang Konsep tanah dalam Perjanjian Lama dan Implikasinya bagi Pemeliharaan Tanah." *BIA': Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual* 2, no. 2 (December 30, 2019): 166–178.
- Supratikno, Agus. "Merajut Kembali Komunitas Damai: Studi Landasan Biblis Dan Teologis Resolusi Konflik." *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat* 3, no. 2 (2019). <https://core.ac.uk/download/pdf/231150286.pdf>.
- Zai, Nikarni, and Junidar Gulo. "Panggilan Kristen Dalam Politik: Melayani Dengan Integritas Dan Kasih." *Imitatio Christo : Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 1, no. 1 (2025): 30–45.